



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BONE
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD AKBAR
2. Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3. NIK : 466053

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	610.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 900 m2/195 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	34.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG SUPER KP 42 SHORT Tahun 2016, HADIAH Rp. 29.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL Tahun 2011, HADIAH Rp. 5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	300.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	32.762.586
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	976.762.586
III. HUTANG	Rp.	22.400.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	954.362.586

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.